

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, TINGKAT
PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

M. Sultan Iqbal

NPM_: 1810011111022

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, TINGKAT
PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

Oleh

Nama : MSULTAN IQBAL

Npm : 1810011111022

Tim Penguji

Ketua

(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

Sekretaris

(Dr. Irwan Muslim, S.E., M.P.)

Anggota

(Nurul Huda, SE, M.Si)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pada tanggal 19 Maret 2025

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta

Dekan

(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, TINGKAT
PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

Oleh

Nama : M.SULTAN IQBAL

Npm : 1810011111022

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Maret 2025

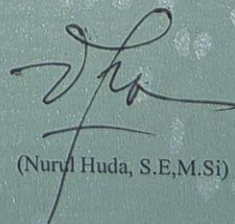
Menyetujui

Pembimbing



(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

Ketua Program Studi



(Nurul Huda, S.E., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Sultan Iqbal

NPM :1810011111022

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Investasi,Tingkat
Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia
terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 25 Maret 2025

M.Sultan Iqbal
(1810011111022)

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, TINGKAT
PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

M. Sultan Iqbal¹⁾, Erni Febrina Harahap²⁾

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta, Padang

Jalan Sumatera Ulak Karang Padang Sumatera Barat

Email: muhammasultaniqbal@gmail.com

Penelitian ini menggunakan metode data panel. Fokus lokasi studi yang dipilih dalam penelitian ini meliputi 34 Provinsi. Teknik analisis data menggunakan model regresi panel melalui 3 pendekatan yaitu CEM, FEM dan REM. Hasil penelitian model terpilih *fixed effect model* menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia, investasi, IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia sedangkan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

Kata Kunci: *Ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pengangguran, IPM*

Abstract

This research uses a panel data method. The focus of the study locations chosen in this research includes 34 provinces. The data analysis technique uses a panel regression model using 3 approaches, namely CEM, FEM and REM. The research results of the selected fixed effect model show that Indonesia's growth, investment, HDI have a significant effect on income inequality in Indonesia, while the unemployment rate has no effect on income inequality in Indonesia.

Keywords: *Income inequality, economic growth, investment, unemployment rate, HDI*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Ketimpangan Pendapatan.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.3 Investasi	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.4 Tingkat Pengangguran.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia	Error! Bookmark not defined.
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
2.5 Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Operasional Variabel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.4 Estimasi Model Data Panel.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Uji Untuk Menentukan Effect Regresi Panel..	Error! Bookmark not defined.

3.5.1 Uji Chow	Error! Bookmark not defined.
3.5.2 Uji Hausman.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.3 Uji LM-test.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Model Regresi Data Panel.....	Error! Bookmark not defined.
3.7 Uji Statistik	Error! Bookmark not defined.
BAB IV GAMBARAN UMUM VARIABEL	Error! Bookmark not defined.
4.1 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2019 -2023	Error! Bookmark not defined.
4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2019 -2023	Error! Bookmark not defined.
4.3 Perkembangan Investasi Di Indonesia Tahun 2019 -2023 ...	Error! Bookmark not defined.
4.4 Perkembangan Pengangguran Di Indonesia Tahun 2019 -2023.....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2019 - 2023	Error! Bookmark not defined.
BAB V HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.1 Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.
5.1.3 Uji Heterokedasitas	Error! Bookmark not defined.
5.2 Uji Untuk Menentukan Effect Regresi Panel.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Uji Chow.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.2. Uji Hausman	Error! Bookmark not defined.
5.2.3 Uji LM-Test	Error! Bookmark not defined.
5.3 Model Regresi Data Panel	Error! Bookmark not defined.
5.3.1 Uji Common Effect	Error! Bookmark not defined.
5.3.2 Uji Fixed Effect Model.....	Error! Bookmark not defined.
5.3.3 Uji Random Effect Model.....	Error! Bookmark not defined.
5.4 Regresi Data Penel	Error! Bookmark not defined.
5.5 Uji Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
5.5.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	Error! Bookmark not defined.
5.5.2 Pengujian F-statistik	Error! Bookmark not defined.
5.5.3 Hasil Pengujian t-Statistik	Error! Bookmark not defined.
5.6 Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.

5.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan ...**Error! Bookmark not defined.**

5.6.2 Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan**Error! Bookmark not defined.**

5.6.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan ...**Error! Bookmark not defined.**

5.6.4 Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN **Error! Bookmark not defined.**

6.1 Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

6.1 Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro, 2003). Ketimpangan pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara kelompok yang berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah. Semakin besar perbedaan pendapatan semakin besar pula variasi dalam ketimpangan pendapatan. Jika ketimpangan terus terjadi antara kelompok yang berpenghasilan tinggi dengan kelompok yang berpenghasilan rendah, maka perekonomian dapat dikatakan tidak merata. Permasalahan yang sering muncul dan yang sering terjadi di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Indikator yang sering dijadikan tolak ukur dalam melihat ketimpangan adalah pendapatan perkapita masyarakatnya. Masyarakat dengan pendapatan perkapita yang tinggi akan lebih mudah aksesnya dalam segala hal, misalnya keinginan memiliki harta, tidak ada keterbatasan dalam hal mengkonsumsi dan lain sebagainya, akan tetapi jika pendapatan perkapitanya rendah maka aksespun akan menjadi terhambat seperti keterbatasan dalam memiliki harta, jumlah konsumsi yang rendah, pendidikan dan kesehatan juga kurang terjamin (Matondang, 2018). Ketimpangan pendapatan di setiap daerah disebabkan perbedaan komposisi jumlah penduduk, sumberdaya yang ada

dan karakteristik setiap daerah. Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan antara masyarakat maupun daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal.

Tabel 1.1
Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2019-2023
(Indeks)

Provinsi	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	0,321	0,319	0,323	0,291	0,296
Sumatera Utara	0,315	0,314	0,313	0,326	0,309
Sumatera Barat	0,307	0,301	0,3	0,292	0,28
Riau	0,331	0,321	0,327	0,323	0,324
Jambi	0,324	0,316	0,315	0,335	0,343
Sumatera Selatan	0,339	0,338	0,34	0,33	0,338
Bengkulu	0,329	0,323	0,321	0,315	0,333
Lampung	0,331	0,32	0,314	0,313	0,324
Kep. Bangka Belitung	0,262	0,257	0,247	0,255	0,245
Kep. Riau	0,337	0,334	0,339	0,325	0,34
Dki Jakarta	0,391	0,4	0,411	0,412	0,431
Jawa Barat	0,398	0,398	0,406	0,412	0,425
Jawa Tengah	0,358	0,359	0,368	0,366	0,369
Di Yogyakarta	0,428	0,437	0,436	0,459	0,449
Jawa Timur	0,364	0,364	0,364	0,365	0,387
Banten	0,361	0,365	0,363	0,377	0,368
Bali	0,37	0,369	0,375	0,362	0,362
Nusa Tenggara Barat	0,374	0,386	0,384	0,374	0,375
Nusa Tenggara Timur	0,355	0,356	0,339	0,34	0,325
Kalimantan Barat	0,318	0,325	0,315	0,311	0,321
Kalimantan Tengah	0,335	0,32	0,32	0,309	0,317
Kalimantan Selatan	0,334	0,351	0,325	0,309	0,313
Kalimantan Timur	0,335	0,335	0,331	0,317	0,322
Kalimantan Utara	0,292	0,3	0,285	0,27	0,277
Sulawesi Utara	0,376	0,368	0,359	0,359	0,37
Sulawesi Tengah	0,33	0,321	0,326	0,305	0,304
Sulawesi Selatan	0,391	0,382	0,377	0,365	0,377
Sulawesi Tenggara	0,393	0,388	0,394	0,366	0,371
Gorontalo	0,41	0,406	0,409	0,423	0,417
Sulawesi Barat	0,365	0,356	0,366	0,371	0,351
Maluku	0,32	0,326	0,316	0,306	0,288
Maluku Utara	0,31	0,29	0,278	0,309	0,3
Papua Barat	0,381	0,376	0,374	0,384	0,37
Papua	0,391	0,395	0,396	0,393	0,386
Indonesia	0,38	0,385	0,381	0,381	0,388

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Pada table 1.1 diatas menunjukkan perkembangan ketimpangan pendapatan di Provinsi Indonesia mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 ketimpangan pendapatan paling rendah adalah Kalimantan Utara sebesar 0,292

indeks, paling tinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 0,428. Pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan paling rendah adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 0,257 indeks, paling tinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 0,437. Lalu pada tahun 2021 ketimpangan pendapatan paling rendah adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 0,247 indeks, paling tinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 0,436. Selanjutnya pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan paling rendah adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 0,255 indeks, paling tinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 0,459. Selanjutnya pada tahun 2023 ketimpangan pendapatan paling rendah adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 0,245 indeks, paling tinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 0,449.

Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih menguntungkan bagi rumah tangga yang berpendapatan tinggi dari pada rumah tangga yang berpendapatan menengah ke bawah. Sehingga, ketika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pasti diiringi dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hal ini terlihat dari per pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembangan dibawah ini:

Tabel 1.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2023
(Persen)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi dan Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	4,14	-0,37	2,81	4,21	4,23
Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
Sumatera Barat	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62
Riau	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21
Jambi	4,35	-0,51	3,7	5,12	4,66
Sumatera Selatan	5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08
Bengkulu	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,26
Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55
Kep. Bangka Belitung	3,32	-2,29	5,05	4,4	4,38
Kep. Riau	4,83	-3,8	3,43	5,09	5,2
Dki Jakarta	5,82	-2,39	3,55	5,25	4,96
Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74	5,45	5
Jawa Tengah	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,98
Di Yogyakarta	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07
Jawa Timur	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
Banten	5,26	-3,39	4,49	5,03	4,81
Bali	5,6	-9,34	-2,46	4,84	5,71
Nusa Tenggara Barat	3,9	-0,62	2,3	6,95	1,8
Nusa Tenggara Timur	5,25	-0,84	2,52	3,05	3,52
Kalimantan Barat	5,09	-1,82	4,8	5,07	4,46
Kalimantan Tengah	6,12	-1,41	3,59	6,45	4,14
Kalimantan Selatan	4,09	-1,82	3,48	5,11	4,84
Kalimantan Timur	4,7	-2,9	2,55	4,48	6,22
Kalimantan Utara	6,89	-1,09	3,99	5,32	4,94
Sulawesi Utara	5,65	-0,99	4,16	5,42	5,48
Sulawesi Tengah	8,83	4,86	11,68	15,22	11,91
Sulawesi Selatan	6,91	-0,71	4,64	5,1	4,51
Sulawesi Tenggara	6,5	-0,65	4,1	5,53	5,35
Gorontalo	6,4	-0,02	2,4	4,04	4,5
Sulawesi Barat	5,56	-2,34	2,57	2,31	5,25
Maluku	5,41	-0,91	3,63	5,31	5,21
Maluku Utara	6,25	5,39	16,79	22,94	20,49
Papua Barat	2,66	-0,76	-0,51	2,01	3,91
Papua	-15,74	2,39	15,16	8,97	5,22
Indonesia	4,98	-2,03	3,71	5,35	5,06

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Pada table 1.2 diatas menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 pertumbuhan

ekonomi paling rendah adalah Papua sebesar -15,74% paling tinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar 8,83%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Bali sebesar -9,34% paling tinggi adalah Maluku Utara sebesar 5,39%. Lalu pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Bali sebesar -2,46% paling tinggi adalah Maluku Utara sebesar 16,79%. Selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Papua Barat sebesar 2,01% paling tinggi adalah Maluku Utara sebesar 22,94%. Selanjutnya pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Nus Tenggara Barat sebesar 1,8% paling tinggi adalah Maluku Utara sebesar 20,49%.

Selanjutnya investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, Penanaman modal atau Investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan baik itu berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini terjadi karena sebagian investasi swasta terpusat hanya di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai daerah-daerah yang mempunyai potensi atau keuntungan yang menjanjikan sehingga akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi.

Tabel 1.3
Perkembangan Investasi Di Indonesia Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

Provinsi	Investasi Menurut Provinsi dan Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	3.606,90	8.241,10	7.904,70	4.424,20	8.883,30
Sumatera Utara	19.749,00	18.189,50	18.484,50	22.789,20	21.574,00
Sumatera Barat	3.026,60	3.106,20	4.183,70	2.559,80	4.488,20
Riau	26.292,20	34.117,80	24.997,80	43.062,00	48.243,30
Jambi	4.437,40	3.511,70	6.204,20	8.882,70	8.939,00
Sumatera Selatan	16.921,10	15.824,50	16.266,90	23.526,00	25.602,40
Bengkulu	5.458,10	5.399,20	4.923,50	6.957,30	7.218,70
Lampung	2.428,90	7.120,50	10.513,20	5.809,20	7.625,80
Kep. Bangka Belitung	2.915,20	1.863,80	3.677,40	6.309,00	7.961,40
Kep. Riau	5.656,40	14.249,00	9.768,70	4.817,40	8.856,60
Dki Jakarta	62.094,80	42.954,70	54.708,20	89.223,60	95.202,10
Jawa Barat	49.284,20	51.400,50	59.948,50	80.808,30	88.012,90
Jawa Tengah	18.654,70	30.606,10	31.311,20	24.992,30	32.987,20
Di Yogyakarta	6.298,80	2.683,40	2.761,30	2.275,00	5.015,50
Jawa Timur	45.452,70	55.660,60	52.552,20	65.355,90	74.937,40
Banten	20.708,40	31.145,70	25.989,50	31.283,90	37.971,70
Bali	7.393,20	5.432,70	6.355,20	6.002,10	6.950,80
Nusa Tenggara Barat	3.519,00	6.582,40	9.090,50	11.031,50	30.766,20
Nusa Tenggara Timur	3.752,60	3.028,50	3.742,60	3.459,30	3.407,20
Kalimantan Barat	7.699,10	9.256,50	10.773,40	9.382,90	14.892,00
Kalimantan Tengah	8.591,90	3.710,00	6.359,80	6.556,80	8.779,50
Kalimantan Selatan	10.061,00	4.286,30	11.003,90	12.310,40	14.909,40
Kalimantan Timur	21.952,00	25.934,00	30.297,40	39.595,60	52.171,70
Kalimantan Utara	4.400,90	2.235,20	3.792,50	7.526,40	8.199,10
Sulawesi Utara	8.259,60	3.005,60	3.480,00	5.042,10	7.698,20
Sulawesi Tengah	4.438,80	5.261,30	3.012,30	3.758,60	4.772,50
Sulawesi Selatan	5.672,60	9.142,00	12.075,40	7.528,00	11.468,30
Sulawesi Tenggara	3.827,10	2.865,70	4.334,20	7.596,00	7.734,60
Gorontalo	844,40	683,60	1.004,30	1.113,50	3.960,10
Sulawesi Barat	1.187,20	252,90	395,30	1.313,30	2.011,10
Maluku	283,20	474,80	2.939,70	611,00	1.904,50
Maluku Utara	682,70	662,10	2.665,30	3.414,90	6.901,00
Papua Barat	380,20	1.925,40	635,60	2.139,10	1.261,90
Papua	567,70	2.722,20	910,80	1.311,80	1.174,10
Indonesia	386.498,40	413.535,50	447.063,60	552.769,00	674.923,40

Sumber : Badan Pusat Statitisk 2024

Pada table 1.3 diatas menunjukkan perkembangan investasi di Indonesia mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 investasi paling rendah adalah Maluku

sebesar 283,20 milyar rupiah paling tinggi adalah DKI Jakarta sebesar 62.094,80 milyar rupiah. Pada tahun 2020 investasi paling rendah adalah Sulawesi Barat sebesar 252,90 milyar rupiah paling tinggi adalah Jawa Timur sebesar 55.660,60 milyar rupiah. Lalu pada tahun 2021 investasi paling rendah adalah Sulawesi Barat sebesar 395,30 milyar rupiah paling tinggi adalah Jawa Barat sebesar 59.948,50 milyar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 investasi paling rendah adalah Maluku sebesar 611,00 milyar rupiah paling tinggi adalah DKI Jakarta sebesar 89.223,60 milyar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2023 investasi paling rendah adalah Papua sebesar 1.174,10 milyar rupiah paling tinggi adalah DKI Jakarta sebesar 95.202,10 milyar rupiah .

Selanjutnya pengangguran merupakan individu ataupun sosok yang tak bekerja ataupun tengah mencari pekerjaan. Pengangguran adalah realitas yang negara berkembang serta negara maju hadapi. Secara general, pengangguran diartikan sebagai situasi di mana mereka yang termasuk dalam kategori tidak memiliki pekerjaan.

Pada table 1.4 dibawah ini menunjukkan perkembangan jumlah pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 tingkat pengangguran paling rendah adalah Bali sebesar 1,57% paling tinggi adalah Banten sebesar 8,11%. Pada tahun 2020 jumlah pengangguran paling rendah adalah Sulawesi Barat sebesar 3,32% paling tinggi adalah DKI Jakarta sebesar 10,95%. Lalu pada tahun 2021 jumlah pengangguran paling rendah adalah Gorontalo sebesar 3,01% paling tinggi adalah Kepulauan Riau sebesar 9,91%. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah pengangguran paling rendah

adalah Sulaawesi Barat sebesar 2,34% paling tinggi adalah Jawa Barat sebesar 8,31%.Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah pengangguran paling rendah adalah Sulawesi Barat sebesar 2,27% paling tinggi adalah Banten sebesar 7,52.

**Tabel 1.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran
Di Indonesia (Persen)**

Provinsi	Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi dan Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	6,17	6,59	6,3	6,17	6,03
Sumatera Utara	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89
Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94
Riau	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23
Jambi	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53
Sumatera Selatan	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11
Bengkulu	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42
Lampung	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23
Kep. Bangka Belitung	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56
Kep. Riau	7,5	10,34	9,91	8,23	6,8
Dki Jakarta	6,54	10,95	8,5	7,18	6,53
Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44
Jawa Tengah	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13
Di Yogyakarta	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
Banten	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52
Bali	1,57	5,63	5,37	4,8	2,69
Nusa Tenggara Barat	3,28	4,22	3,01	2,89	2,8
Nusa Tenggara Timur	3,14	4,28	3,77	3,54	3,14
Kalimantan Barat	4,35	5,81	5,82	5,11	5,05
Kalimantan Tengah	4,04	4,58	4,53	4,26	4,1
Kalimantan Selatan	4,18	4,74	4,95	4,74	4,31
Kalimantan Timur	5,94	6,87	6,83	5,71	5,31
Kalimantan Utara	4,49	4,97	4,58	4,33	4,01
Sulawesi Utara	6,01	7,37	7,06	6,61	6,1
Sulawesi Tengah	3,11	3,77	3,75	3	2,95
Sulawesi Selatan	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33
Sulawesi Tenggara	3,52	4,58	3,92	3,36	3,15
Gorontalo	3,76	4,28	3,01	2,58	3,06
Sulawesi Barat	2,98	3,32	3,13	2,34	2,27
Maluku	6,69	7,57	6,93	6,88	6,31
Maluku Utara	4,81	5,15	4,71	3,98	4,31
Papua Barat	6,43	6,8	5,84	5,37	5,38
Papua	3,51	4,28	3,33	2,83	2,67
Indonesia	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Human Development Index. Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah. Kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi.

Pada table 1.5 dibawah ini menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia di Indonesia mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 indeks pembangunan manusia paling rendah adalah Papua sebesar 60,84 paling tinggi adalah DKI Jakarta sebesar 80,76. Pada tahun 2020 indeks pembangunan manusia paling rendah adalah Papua sebesar 60,44 paling tinggi adalah DKI Jakarta sebesar 80,77. Lalu pada tahun 2021 indeks pembangunan manusia paling rendah adalah Papua sebesar 60,62 paling tinggi adalah DKI Jakarta sebesar 81,11. Selanjutnya pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia paling rendah adalah Papua sebesar 61,39 paling tinggi adalah DKI Jakarta sebesar 81,65. Selanjutnya pada tahun 2023 Papua sebesar 62,25 paling tinggi adalah DKI Jakarta sebesar 82,46.

Tabel 1.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia
(Poin)

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi dan Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	71,9	71,99	72,18	72,8	73,4
Sumatera Utara	71,74	71,77	72	72,71	73,37
Sumatera Barat	72,39	72,38	72,65	73,26	73,75
Riau	73	72,71	72,94	73,52	74,04
Jambi	71,26	71,29	71,63	72,14	72,77
Sumatera Selatan	70,02	70,01	70,24	70,9	71,62
Bengkulu	71,21	71,4	71,64	72,16	72,78
Lampung	69,57	69,69	69,9	70,45	71,15
Kep. Bangka Belitung	71,3	71,47	71,69	72,24	72,85
Kep. Riau	75,48	75,59	75,79	76,46	77,11
Dki Jakarta	80,76	80,77	81,11	81,65	82,46
Jawa Barat	72,03	72,09	72,45	73,12	73,74
Jawa Tengah	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39
Di Yogyakarta	79,99	79,97	80,22	80,64	81,07
Jawa Timur	71,5	71,71	72,14	72,75	73,38
Banten	72,44	72,45	72,72	73,32	73,87
Bali	75,38	75,5	75,69	76,44	77,1
Nusa Tenggara Barat	68,14	68,25	68,65	69,46	70,2
Nusa Tenggara Timur	65,23	65,19	65,28	65,9	66,68
Kalimantan Barat	67,65	67,66	67,9	68,63	69,41
Kalimantan Tengah	70,91	71,05	71,25	71,63	72,2
Kalimantan Selatan	70,72	70,91	71,28	71,84	72,5
Kalimantan Timur	76,61	76,24	76,88	77,44	78,2
Kalimantan Utara	71,15	70,63	71,19	71,83	72,49
Sulawesi Utara	72,99	72,93	73,3	73,81	74,36
Sulawesi Tengah	69,5	69,55	69,79	70,28	70,95
Sulawesi Selatan	71,66	71,93	72,24	72,82	73,46
Sulawesi Tenggara	71,2	71,45	71,66	72,23	72,79
Gorontalo	68,49	68,68	69	69,81	70,45
Sulawesi Barat	65,73	66,11	66,36	66,92	67,55
Maluku	69,45	69,49	69,71	70,22	70,94
Maluku Utara	68,7	68,49	68,76	69,47	70,21
Papua Barat	64,7	65,09	65,26	65,89	66,66
Papua	60,84	60,44	60,62	61,39	62,25
Indonesia	71,92	71,94	72,29	72,91	73,55

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas diatas dapat diketahui bahwa kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antara kelompok

masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. . Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dalam penelitian penulis mengajukan sejumlah perumusan masalah yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Bagaimana indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

2. Untuk menganalisisa pengaruh Investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Untuk menganalisisa pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan Di Indonesia?
4. Untuk menganalisisa indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan Di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.
2. Bagi Pemerintah, Hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi yang berguna dalam pengambilan kebijakan strategis di bidang perekonomian secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

